

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 *Stakeholder Theory*

R. Edward Freeman pertama kali mengembangkan *stakeholder theory* pada tahun 1984, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak harus bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri sebaliknya, ia harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan lainnya. *Stakeholder theory* adalah teori yang mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap strategi perusahaan kedepannya. Pandangan ini dimungkinkan karena stakeholder termasuk dalam bagian dari perusahaan yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya keuangan yang digunakan dalam operasi perusahaan (Shafamega, 2021).

Suatu perusahaan dapat menunjukkan kepedulian lingkungan dengan menyampaikan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pemangku kepentingannya. Menurut teori ini, hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat mempengaruhi pemangku kepentingannya untuk bekerja sama untuk mencapai kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya Mustofa et al. (2020). Tujuan teori pemangku kepentingan dalam bisnis adalah untuk menguntungkan semua pihak yang terkait. Dengan mengadopsi *Corporate Social Responsibility*

(CSR), sebuah perusahaan dapat mencapai tujuan perusahaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelanggan, pekerja, dan masyarakat di tempat sekitarnya sehingga dapat mengembangkan interaksi positif antara bisnis dan lingkungan sekitar tempat beroperasi.

Sumber daya keuangan perusahaan diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan tidak hanya terbatas pada menjaga kondisi keuangan yang sehat, tetapi juga mencakup dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan yang melaporkan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial dan lingkungan.

Kemampuan perusahaan untuk bertahan bergantung pada dukungan yang diterima dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan upayanya dalam beradaptasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Interaksi antara perusahaan dan pemangku kepentingan dianggap sebagai bagian dari pengungkapan sosial.

2.1.2 *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu kepentingan bagi perusahaan, selain sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum tetapi juga untuk menjaga kelangsungan perusahaan serta menghindari dampak buruk terhadap terhadap aspek sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan

perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia telah diatur pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (PT), pada pasal tersebut Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menjalankan bisnis secara etis dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi komunitas lokal maupun masyarakat secara luas, sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus didasarkan pada gagasan *triple bottom line* (3p) yang menyatakan perusahaan selalu mengutamakan keuntungan (*profit*), juga harus mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (*people*) dan juga harus mewujudkan kesejahteraan lingkungan (*planet*), ketiga elemen tersebut merupakan hal yang harus dikembangkan sehingga menjadi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berkelanjutan.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap penting bagi perusahaan selain sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum tetapi juga untuk menjaga kelangsungan perusahaan serta menghindari dampak buruk terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari aktivitas perusahaan.

Tingginya profitabilitas perusahaan akan membuat perusahaan berusaha untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam melaksanakan kegiatan, dengan cara

melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lebih banyak. Banyaknya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan nantinya akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Caranya adalah dengan memberikan skor 1 (satu) untuk setiap item yang diungkapkan dan skor 0 (nol) untuk item yang tidak diungkapkan. Pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menggunakan indeks CSR dengan berpedoman pada *Sustainability Report Global Reporting Initiative Generation Four* (GRI 4). Pada GRI 4 mencakup 91 pengungkapan terdiri dari 6 kategori, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, Masyarakat sosial, dan tanggung jawab produksi, berikut adalah indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan GRI 4:

Tabel 2.1 Indeks Pengungkapan CSR berdasarkan GR1 4

NO	KODE	INDIKATOR
		KATEGORI: EKONOMI
		Aspek: Kinerja Ekonomi
1	EC 1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
2	EC 2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perusahaan iklim
3	EC 3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
4	EC 4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
		Aspek: Keberadaan Pasar
5	EC 5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut <i>gender</i> dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
6	EC 6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
7	EC 7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
8	EC 8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Aspek: Praktik Pengadaan		
9	EC 9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
KATEGORI: LINGKUNGAN		
Aspek: Bahan		
10	EN 1	Bahan yang digunakan berdasarkan bobot atau volume
11	EN 2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
12	EN 3	Konsumsi energi dalam organisasi
13	EN 4	Konsumsi energi di luar organisasi
14	EN 5	Intensitas energi
15	EN 6	Pengurangan konsumsi energi
16	EN 7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Aspek: Air		
17	EN 8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
18	EN 9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
19	EN 10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Aspek: Keanekaragaman Hayati		
20	EN 11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa dan dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
21	EN 12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
22	EN 13	Habitat yang dilindungi atau dipulihkan
23	EN 14	Jumlah total spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Aspek: Emisi		
24	EN 15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
25	EN 16	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung (cakupan 2)
26	EN 17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
27	EN 18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
28	EN 19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
29	EN 20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
30	EN 21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
Aspek: Efluen dan Limbah		

31	EN 22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
32	EN 23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
33	EN 24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
34	EN 25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel Lampiran I, II, III, dan VII yang diangkut untuk pengiriman internasional
35	EN 26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan air limpasan dari organisasi
Aspek: Produk dan Jasa		
36	EN 27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
37	EN 28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
Aspek: Kepatuhan		
38	EN 29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Aspek: Transportasi		
39	EN 30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Aspek: Lain-lain		
40	EN 31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Aspek: Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
41	EN 32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
42	EN 33	Dampak lingkungan negatif signifikan actual dan potensial dalam rantai pasokan dan Tindakan yang diambil
Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
43	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI: SOSIAL		
Sub-Kategori; Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
Aspek: Kepegawaian		
44	LA 1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> , dan wilayah
45	LA 2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
46	LA 3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut <i>gender</i>
Aspek: Hubungan Industrial		
47	LA 4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam

		perjanjian bersama
	Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
48	LA 5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
49	LA 6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja menurut daerah dan <i>gender</i>
50	LA 7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
51	LA 8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
	Aspek: Pelatihan dan Pendidikan	
52	LA 9	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut <i>gender</i> , dan menurut kategori karyawan
53	LA 10	Program untuk manajemen ketrampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
54	LA 11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
	Aspek: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	
55	LA 12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
	Aspek: Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	
56	LA 13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan Lokasi operasional yang signifikan
	Aspek: Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan	
57	LA 14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
58	LA 15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	
59	LA 16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
	Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia	
	Aspek: Investasi	
60	HR 1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
61	HR 2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang

		relevan dengan operasi termasuk persentase karyawan yang dilatih
	Aspek: Non-Diskriminasi	
62	HR 3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
	Aspek: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Sama	
63	HR 4	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi untuk melatih kebebasan dari asosiasi dan <i>collective bargaining</i> dalam risiko yang signifikan dan aksi yang diambil untuk mendukung hal tersebut
	Aspek: Pekerja Anak	
64	HR 5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan Tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
	Aspek: Pekerja atau Wajib Kerja	
65	HR 6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan Tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
	Aspek: Praktik Pengamanan	
66	HR 7	Persentase petugas pengaman yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
	Aspek: Hak Adat	
67	HR 8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan Tindakan yang diambil
	Aspek: Asesmen	
68	HR 9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
	Aspek: Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	
69	HR 10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
70	HR 11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	Aspek: Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	
71	HR 12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
	Sub-Kategori: Masyarakat	
	Aspek: Masyarakat Lokal	
72	SO 1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
73	SO 2	Operasi dengan dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat
	Aspek: Anti-Korupsi	
74	SO 3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi

75	SO 4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
76	SO 5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Aspek: Kebijakan Publik		
77	SO 6	Nilai total kontribusipolitik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Aspek: Anti-Persaingan		
78	SO 7	Jumlah total Tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Aspek: Kepatuhan		
79	SO 8	Nilai monitor denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
Aspek: Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat		
80	SO 9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
81	SO 10	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan Tindakan
Aspek: Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat		
82	SO 11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap Masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Sub-Kategori: Tanggung Jawab atas Produk		
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
83	PR 1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap Kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
84	PR 2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Aspek: Pelabelan Produk dan jasa		
85	PR 3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
86	PR 4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa menurut hasil
87	PR 5	Hasil survey untuk mengukur kepuasan pelanggan
Aspek: Komunikasi Pemasaran		
88	PR 6	Penjualan produk yang dilarang atau sengketaan
89	PR 7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil.
Aspek: Privasi Pelanggan		

90	PR 8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data
Aspek: Kepatuhan		
91	PR 9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk jasa

Sumber: www.globalreporting.org

Sesuai dengan standar yang berlaku maka rumusan yang digunakan dalam mengukur *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum Xi_j}{N_j}$$

Keterangan :

CSRI_j : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* Perusahaan

N_j : Jumlah 91 item pengungkapan

∑Xi : 1= jika item diungkapkan, 0= jika item tidak diungkapkan

2.1.3 Gender Diversity

Gender diversity merupakan suatu konsep yang memandang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis , seperti aspek budaya, sosial, dan perilaku (A. Pratama et al., 2024). Laki-laki dan Perempuan memiliki perbedaan dalam aspek emosional dan intelektual. Laki-laki cenderung memiliki sifat maskulin yang ditandai dengan kemandirian, rasionalitas, perhatian penuh dan daya saing. Sementara itu, perempuan memiliki sifat feminim yang ditandai dengan intuisi yang penuh kepedulian, sensitif, penuh perhatian, dan dapat diandalkan (Yulia et al., 2022). Perbedaan antara laki-laki dan Perempuan lebih dilihat dari sudut pandang sosial dan bagaimana mereka menerima, mengolah informasi untuk melakukan pekerjaan dan membuat keputusan (Nanda & Rismayani, 2019).

Keragaman *gender* di perusahaan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam hal inovasi, kreativitas dan tanggung jawab sosial. Keragaman *gender* menggambarkan distribusi laki-laki dan perempuan diantara anggota dewan. Kehadiran perempuan di jajaran dewan direksi diyakini dapat mengurangi risiko bagi perusahaan, karena perempuan cenderung lebih berhati-hati dan menghindari risiko dibandingkan laki-laki (Karlinda et al., 2021).

Perusahaan dengan keragaman *gender* yang tinggi cenderung memiliki perspektif yang luas dalam mengambil keputusan. Secara psikologis, perempuan mempunyai sifat emosional yang lebih menunjukkan kepekaan terhadap kepentingan orang lain, sehingga perempuan berusaha memahami sudut pandang pemangku kepentingan. Kehadiran perempuan dalam dewan direksi dapat memberikan peluang untuk mengoptimalkan partisipasi perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, memberikan arahan dan tujuan.

Penerapan *gender diversity* membutuhkan komitmen untuk mendobrak hambatan struktural dan budaya yang membatasi partisipasi *gender* tertentu, dengan mengedepankan kebijakan yang mendukung kesetaraan, pendidikan, dan perubahan pola pikir. Menurut Yuniarti et al. (2023) dalam pengukurannya *gender diversity* menggunakan variabel *dummy* dengan ketentuan sebagai berikut:

1: jika perusahaan memiliki dewan direksi dan dewan komisaris perempuan dalam perusahaan

0: jika perusahaan tidak memiliki dewan direksi dan dewan komisaris perempuan dalam perusahaan

2.1.4 *Green Accounting*

Green accounting adalah proses untuk mengukur, mencatat, mengidentifikasi, merangkum, melaporkan, peristiwa atau dampak kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan suatu proses terhadap masyarakat, lingkungan hidup, serta perusahaan itu sendiri. *Green Accounting* adalah pengenalan akuntansi sebagai salah satu jenis komitmen perusahaan terhadap dampak kegiatan operasional, termasuk biaya lingkungan dalam biaya perusahaan. *Green Accounting* memiliki fungsi laporan internal dan eksternal. Perusahaan menggunakan operasi internal untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dalam meningkatkan manajemen biaya lingkungan. Sementara itu, kegiatan eksternal digunakan untuk mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan, investor atau masyarakat.

Green Accounting merupakan salah satu cara perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan, karena pemangku kepentingan cenderung lebih memperhatikan nilai lingkungan selain nilai ekonomi, yaitu perusahaan yang peduli terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana penerapan *green accounting* dapat menilai evaluasi Program Kinerja Perusahaan (PROPER) yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLH).

PROPER yang diperoleh perusahaan dikomunikasikan melalui simbol-simbol berwarna untuk melakukan asimilasi informasi oleh pemangku kepentingan. Secara umum, system PROPER untuk perusahaan mencakup lima warna, dimulai dari kategori tertinggi dan paling berharga, yaitu emas, hijau, biru, merah, hingga yang paling rendah, yaitu hitam. Berikut adalah penejelasanannya:

Tabel 2.2
Kategori dan Skor Pemeringkatan PROPER

Warna	Peringkat	Skor
Emas	Sangat-sangat Baik	5
Hijau	Sangat Baik	4
Biru	Baik	3
Merah	Buruk	2
Hitam	Sangat Buruk	1

Adapun penjelasan terkait peringkat dan warna pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Emas, berarti perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan lebih dari yang diwajibkan dan melakukan pengembangan masyarakat berkelanjutan.
2. Hijau, berarti perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang disyaratkan.
3. Biru, berarti perusahaan telah memenuhi seluruh aspek yang disyaratkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

4. Merah, berarti perusahaan telah berinvestasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun hanya sedikit yang sesuai dengan yang disyaratkan.
5. Hitam, berarti belum menjaga lingkungan secara berhati-hati sehingga dapat mencemari lingkungan, dan mendapatkan risiko Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menutupi izin kegiatannya.

Penerapan *Green Accounting* yang baik di perusahaan menciptakan kepercayaan di mata pemangku kepentingan, yang berdampak pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Darma et al., 2019). Dengan *Green Accounting*, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan tertarik pada perusahaan karena perusahaan peduli terhadap lingkungan dan dampak dari kegiatan operasinya.

2.1.5 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu prinsip, mekanisme, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak terkait (*stakeholders*), seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas.

Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*): Menjamin adanya keterbukaan informasi yang relevan dan mudah di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*): Menegaskan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan organisasi untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*): Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Kemandirian (*Independency*): Mencegah pengaruh atau dominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga tetap objektif.
5. Keadilan (*Fairness*): Menjamin adanya perlakuan yang adil bagi semua pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja, meminimalkan risiko, menciptakan reputasi yang positif, serta memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan bisnis. *Good Corporate Governance* (GCG) juga menjadi kerangka kerja untuk mengelola konflik kepentingan, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini menggunakan variabel dewan komisaris independen.

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota direksi, maupun pemegang saham pengendali. Menurut IAI (2015), peraturan mengenai

keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI Tahun 2000 mengenai beberapa kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independent tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan komisaris lainnya perusahaan yang tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham.

Keberadaan komisaris independent seharusnya besikap netral dalam menilai segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Komisaris independen tidak terpengaruhi oleh manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas terhadap pemangku kepentingannya. Dengan demikian, semakin besar komposisi komisaris independen, maka semakin objektif dewan komisaris serta dapat melindungi kepentingan para pemangku

kepentingan serta dapat mendukung semakin luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dewan komisaris independent dapat mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan aktivitasnya. Karena aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) pasti terpantau oleh dewan komisaris independen, karena dewan komisaris independen berpegang pada prinsip keseimbangan kepentingan berbagai pihak maka dewan komisaris independen bertujuan untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar memberikan kepuasan terhadap pihak yang berkepentingan pada *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Devi et al. (2020) pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	(A. Pratama et al., 2024)	Pengaruh <i>Gender Diversity</i> Dan <i>Green Accounting</i> Terhadap Pengungkapan CSR Pada Perusahaan LQ45 Tahun 2015-2022	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>gender diversity</i> memiliki probabilitas sebesar 0,2085 yang lebih tinggi daripada angka signifikan 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa <i>gender diversity</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

			pengungkapan CSR. Oleh karena itu, hipotesis pertama ditolak. 2. Variabel <i>green accounting</i> memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0008 lebih kecil dari 0,05 maka ditarik Kesimpulan bahwa <i>green accounting</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, sehingga hipotesis kedua diterima.
2.	(Mutmainah et al., 2024)	Pengaruh <i>Gender Diversity</i>, Agresivitas Pajak, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Perusahaan Produk dan Perlengkapan Bangunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022)	1. Terdapat pengaruh yang signifikan <i>gender diversity</i> terhadap <i>corporate sosial responsibility</i> sektor produk dan perlengkapan bangunan. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan agresivitas pajak terhadap <i>corporate sosial responsibility</i> sektor produk dan perlengkapan bangunan. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan <i>good corporate governance</i> terhadap <i>corporate sosial responsibility</i> sektor produk dan perlengkapan bangunan.
3.	(Kusuma et al., 2023)	Pengaruh <i>Gender Diversity</i>,	1. Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>gender diversity</i>

		Agresivitas Pajak, dan <i>Green Accounting</i> Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI 2018-2021)	berpengaruh terhadap CSR. 2.Hasil penelitian menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak berpengaruh terhadap CSR. 3.Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>green accounting</i> berpengaruh terhadap CSR.
4.	(Nakita et al. 2024)	Pengaruh Kinerja Lingkungan, <i>Green Accounting</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Pada Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022)	Hasil penelitian mengungkapkan temuan menarik bahwa kinerja lingkungan, <i>green accounting</i> , dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap pengungkapan CSR. Namun, ketika ditelisik lebih dalam, hanya <i>green accounting</i> yang memiliki dampak positif kuat secara individual terhadap pengungkapan CSR.
5.	(Indarwati, 2024)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social</i>	Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> . Sedangkan

		<i>Responsibility</i>	profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> .
6	(Mulyani & Rosharlianti, 2023)	Pengaruh <i>board diversity</i> dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>gender diversity</i> sebagai mekanisme <i>board diversity</i> dan pendidikan dewan komisaris sebagai mekanisme <i>board diversity</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
7	(Dwimartha et al., 2023)	Peran Pendidikan CEO, Keberagaman <i>Gender</i> , dan Dimensi Keuangan Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR Sektor Manufaktur di Indonesia	Hasil penelitian keberagaman <i>gender</i> dalam direksi memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR dan tidak bersifat signifikan, pendidikan CEO memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR dan berpengaruh secara signifikan.
8	(May et al., 2023)	Pengaruh Implementasi <i>Green Accounting</i> , <i>Material Flow Cost Accounting</i> Dan <i>Environmental</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>green accounting</i> tidak berpengaruh <i>sustainable development</i> . MFCA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainable</i>

		<i>Performance Terhadap Sustainable Development</i>	<i>development. Sementara itu, environmental performance tidak berpengaruh terhadap sustainable development.</i>
9	(Agnes, 2023)	<i>The Effect Of Green Accounting, Company Size, Profitability, Media Disclosure, and Board of Commissioners' Size on Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Greean Accounting</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> . Sementara itu, ukuran perusahaan, profitabilitas, pengungkapan media, dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
10	(Inawati & Oktafitria, 2023)	Bagaimana <i>Gender, Risk, dan Media</i> terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>risk minimization</i> dan <i>media exposure</i> berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> . Sementara itu, <i>gender diversity</i> dan profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
11	(Saputri & Setyowati,	Pengaruh <i>Green accounting, Firm</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>firm size</i> dan <i>media</i>

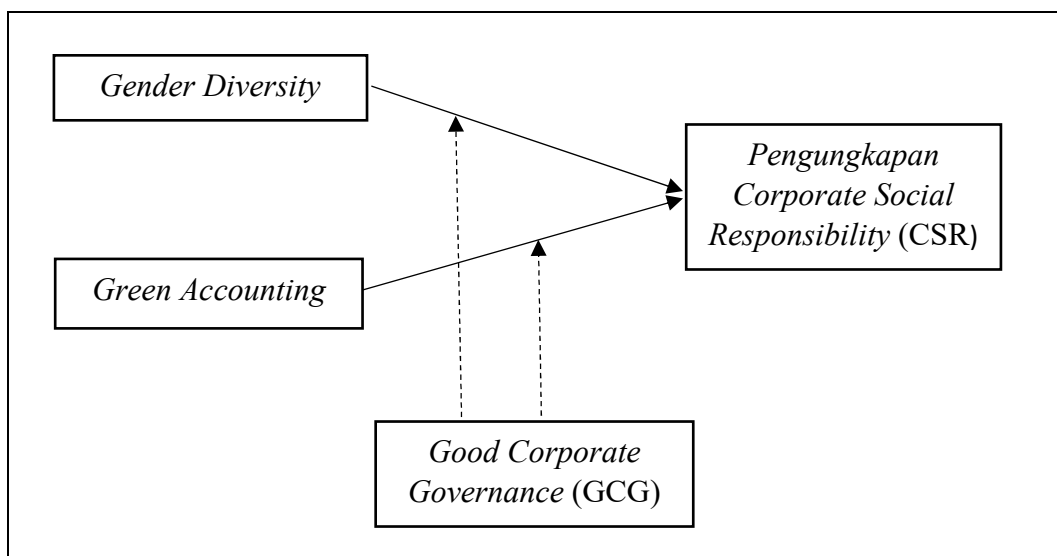
	2024)	<i>size, Media Exposure Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility</i>	<i>exposure</i> berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> . Sementara itu, <i>green accounting</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .
12	(Azzahra et al., 2021)	Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting</i> , Karakteristik Komite Audit, Diversitas Kebangsaan Direksi Dan Gender Direksi Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Di Perbankan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan <i>Green Accounting</i> tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR, Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, Diversitas Kebangsaan Direksi berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan CSR, <i>Gender</i> Direksi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.
13	(Rosdwiana & Januar, 2023)	Pengaruh <i>Gender Diversity</i> , Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap	Hasil penelitian menunjukan bahwa <i>Gender Diversity</i> berpengaruh pada Pengungkapann Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap

		Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Agresivitas Pajak Sebagai Pemoderasi	Pengungkapann Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, GCG tidak dapat memoderasi pengaruh <i>Gender Diversity</i> terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, GCG tidak dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, GCG tidak dapat memoderasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
14	(Hidayat et al., 2023)	Pengaruh <i>Green accounting</i> Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Pemoderasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Green Accounting</i> dan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap CSR. GCG tidak dapat memoderasi pengaruh <i>green accounting</i> terhadap CSR serta GCG tidak dapat memoderasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap CSR.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap pembahasan masalah yang ada. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut:

Gambar 2. Kerangka Konseptual



Keterangan:

X1 : *Gender Diversity*

X2 : *Green Accounting*

Y : *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*

Z : *Good Corporate Governance (GCG)*

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah untuk mendefinisikan secara operasional variabel-variabel yang akan diteliti, meliputi: definisi, metode pengukuran dan alat ukur yang digunakan. Berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 2.4 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
Variabel Dependen			
1	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> merupakan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan.	Sesuai standar yang berlaku maka rumus yang digunakan dalam mengukur <i>Corporate Social Responsibility</i> adalah sebagai berikut: 1 (satu) jika item diungkapkan 0 (nol) jika item tidak diungkapkan $CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$ Keterangan: <i>CSRI_j</i>: <i>Corporate Social Responsibility Disclosure Index</i> Perusahaan <i>N_j</i>: Jumlah 91 item pengungkapan $\sum X_i$: 1=jika item diungkapkan, 0=jika item tidak diungkapkan
Variabel Independen			
2	<i>Gender Diversity</i>	<i>Gender diversity</i> adalah mengacu pada kesetaraan gender, yaitu untuk memastikan kesempatan yang sama diposisi utama perusahaan.	Pengukuran <i>Gender Diversity</i> menggunakan variabel <i>dummy</i> dengan ketentuan sebagai berikut: 1: jika perusahaan memiliki dewan direksi dan dewan komisaris Perempuan dalam perusahaan 0: jika perusahaan tidak memiliki dewan direksi dan dewan komisaris Perempuan dalam perusahaan
3	<i>Green Accounting</i>	<i>Green accounting</i> merupakan proses akuntansi	Peringkat PROPER: - Emas, diberi skor 5 dengan peringkat sangat-sangat baik - Hijau, diberi skor 4 dengan peringkat

		yang menangani peristiwa ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berguna untuk mengambil keputusan	sangat baik 3. Biru, diberi skor 3 dengan peringkat baik 4. Merah, diberi skor 2 dengan peringkat buruk 5. Hitam, diberi skor 1 dengan peringkat sangat buruk
Variabel Moderasi			
4	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i> adalah suatu prinsip, mekanisme, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola suatu perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas	Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $DKI = \frac{\text{Jumlah Anggota DKI}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$ Keterangan: DKI: Dewan Komisaris Independen

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Gender Diversity merupakan suatu konsep yang memandang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis, seperti aspek budaya, sosial, dan perilaku A. Pratama et al (2024). Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam aspek emosional dan intelektual. Laki-laki cenderung memiliki sifat maskulin yang ditandai dengan kemandirian, rasionalitas, perhatian penuh dan daya saing. Sementara itu, perempuan memiliki sifat feminim yang ditandai dengan intuisi yang penuh perhatian, dan dapat diandalkan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan lebih dilihat dari sudut pandang sosial dan bagaimana mereka menerima, mengelola informasi untuk melakukan pekerjaan dan membuat keputusan Nanda & Rismayani (2019).

Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk menguji apakah keberagaman *gender* dalam dewan direksi dan manajemen puncak perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, khususnya pada perusahaan pertambangan. Keberagaman *gender*, yang mengacu pada proporsi perempuan dalam posisi strategis perusahaan, diyakini dapat membawa perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian Mutmainah et al. (2024) menyatakan bahwa *Gender Diversity* terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

perempuan cenderung memiliki perhatian lebih terhadap aspek sosial dan keberlanjutan, yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan transparan dalam mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial mereka. Oleh karena itu, perusahaan dengan keberagaman *gender* yang lebih tinggi dalam struktur manajemennya diharapkan akan lebih cenderung untuk mengungkapkan kegiatan CSR secara lebih komprehensif dan rinci, baik melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan. Keberagaman *gender* dalam perusahaan juga diharapkan dapat memperkaya pengambilan keputusan dan mempengaruhi prioritas perusahaan terhadap kebijakan yang mendukung keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan demikian, hipotesis ini mengasumsikan bahwa perusahaan yang memiliki keberagaman *gender* lebih besar dalam dewan direksi dan manajemen puncak akan memiliki tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih tinggi.

H1: *Gender Diversity* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.5.2 Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Green Accounting adalah proses untuk mengukur, mencatat, mengidentifikasi, merangkum, melaporkan, peristiwa atau dampak kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan atau proses terhadap, masyarakat, lingkungan hidup, serta perusahaan itu sendiri. *Green Accounting* Adalah pengenalah akuntansi sebagai salah satu jenis komitmen perusahaan terhadap dampak

kegiatan operasional, termasuk biaya lingkungan dalam biaya perusahaan. *Green Accounting* memiliki fungsi laporan internal dan eksternal. Perusahaan menggunakan operasi internal untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dalam meningkatkan manajemen biaya lingkungan. Sementara itu, kegiatan eksternal digunakan untuk mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan, investor atau masyarakat.

Green Accounting terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk menguji apakah penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan. *Green accounting* mengacu pada praktik pencatatan dan pelaporan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan, termasuk pencatatan biaya terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Dalam industri pertambangan, yang sering menghadapi kritik terkait dampak lingkungan, penerapan *green accounting* dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan upaya mereka dalam mengurangi jejak ekologis dan mengelola risiko lingkungan. Perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip *green accounting* cenderung lebih fokus pada keberlanjutan dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan, sehingga mereka lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dan komprehensif mengenai kebijakan dan kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka.

Menurut hasil penelitian Pratama et al.(2024) menyatakan bahwa *Green Accounting* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan demikian, hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin kuat penerapan *green accounting* dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan.

H2: *Green Accounting* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

2.5.3 Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dimoderasi *Good Corporate Governance*

Gender Diversity adalah keberagaman representasi *gender* dalam struktur perusahaan, khususnya pada dewan direksi atau komisaris. Keberagaman ini diyakini mampu membawa perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sendiri merupakan penyampaian informasi oleh perusahaan terkait aktivitas sosial, lingkungan, dan keberlanjutan yang dilakukan, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Sementara itu, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang diharapkan dapat memperkuat hubungan positif antara *gender diversity* dan pengungkapan CSR.

Pengaruh *gender diversity* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (GCG) mengusulkan bahwa keberagaman *gender* di dalam dewan direksi dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dewan yang lebih beragam secara *gender* cenderung membawa beragam perspektif, yang dapat memperhatikan berbagai isu sosial dan lingkungan secara lebih holistik. Peningkatan perhatian terhadap tanggung jawab sosial ini pada gilirannya mendorong perusahaan untuk lebih aktif dan terbuka dalam mengungkapkan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka. Namun, pengaruh *gender diversity* ini tidak berlangsung secara otomatis. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat memperkuat hubungan tersebut, karena prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban menciptakan kerangka kerja yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih lengkap dan jujur terkait kegiatan sosial dan lingkungan mereka.

Dengan demikian, *Good Corporate Governance* (GCG) bertindak sebagai faktor moderasi yang memperkuat dampak positif *gender diversity* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik akan cenderung lebih efektif dalam mengintegrasikan keberagaman *gender* dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosdwiana & Januar (2023) menyatakan bahwa

Good Corporate Governance mampu memoderasi pengaruh *Gender Diversity* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H3: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *gender diversity* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

2.5.4 Pengaruh *Green Accounting* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dimoderasi *Good Corporate Governance*

Green Accounting adalah pendekatan akuntansi yang memperhitungkan biaya dan dampak lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan, seperti penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan emisi karbon. Dengan memasukkan faktor lingkungan ke dalam perhitungan, perusahaan dapat menampilkan kinerja yang lebih transparan dan akurat, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga keberlanjutan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sendiri merupakan bentuk pelaporan perusahaan mengenai aktivitas sosial, lingkungan, dan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Sementara itu, *Good Corporate Governance (GCG)* adalah tata kelola perusahaan yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang diharapkan dapat mendukung implementasi *green accounting* secara optimal.

Pengaruh *green accounting* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance (GCG)* berargumen bahwa penerapan *green accounting* dapat meningkatkan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan, dengan *Good Corporate Governance (GCG)* berfungsi sebagai faktor yang memperkuat

hubungan ini. *Green accounting* berfokus pada pencatatan dan pelaporan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan, yang mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Namun, pengaruh *green accounting* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diperkuat melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen, dapat mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam melaporkan informasi yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka.

Dengan demikian, hipotesis ini menyarankan bahwa *green accounting* yang diterapkan dengan baik, bila dimoderasi oleh *Good Corporate Governance*, akan menghasilkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih lengkap, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan, meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik serta pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat et al (2023) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh *Green Accounting* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H4: *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *green accounting* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*